

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2022

NOMOR: 7

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
4. Pemerintahan ...

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

14. Jabatan ...

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Satpol PP.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Satpol PP.
18. Pejabat lingkup Satpol PP adalah pejabat pada Satpol PP.
19. Tata Kerja adalah cara pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja.
20. Unit Kerja adalah satuan kerja internal Satpol PP.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP.
22. Etika Birokrasi adalah norma dan/atau aturan yang melekat pada setiap Pegawai ASN dimanapun dan kapanpun dia berada, baik di kantor maupun di tengah-tengah masyarakat, terikat dengan aturan kepegawaian dan aturan norma dalam masyarakat yang menjadi landasan etika dalam bertindak dan berperilaku dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB ...

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, membawahi:
 1. Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 2. Seksi Kerjasama dan Kemitraan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (4) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan ...

- (6) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala Satpol PP
Paragraf 1
Tugas

Pasal 5

Kepala Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pengarahan kegiatan penyusunan rencana operasional di lingkup Satpol PP dengan menjabarkan rencana operasional Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup Satpol PP sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. pengendalian tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Satpol PP;
- e. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Satpol PP sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Satpol PP dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pengendalian tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satpol PP;
- i. penyelenggaraan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Satpol PP memiliki rincian tugas:

- a. menyelenggarakan ...

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 1. menetapkan jadwal kegiatan penyusunan dokumen rencana strategis;
 2. merancang konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 3. memantau pelaksanaan kegiatan rencana strategis dan kebijakan teknis lingkup Satpol PP;
 4. mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait; dan
 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengarahkan kegiatan penyusunan rencana operasional lingkup Satpol PP dengan menjabarkan rencana operasional Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 1. menjabarkan rencana strategis Satpol PP;
 2. memetakan peluang dan hambatan organisasi dalam pencapaian rencana strategis Satpol PP;
 3. merancang konsep program kerja berdasarkan hasil analisis sebagai solusi dalam pencapaian rencana strategis Satpol PP;
 4. merancang target, *outcome/output*, dan indikator-indikator untuk masing-masing program kerja yang akan dilakukan; dan
 5. mendistribusikan rencana operasional sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab bawahan lingkup Satpol PP.
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas lingkup Satpol PP sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana, dengan tahapan:
 1. menelaah rencana pelaksanaan program kerja unit;
 2. menentukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait;
 3. mengadakan rapat koordinasi dengan bawahan atau pihak yang terkait; dan
 4. memberikan arahan teknis pelaksanaan tugas.
- d. mengendalikan ...

- d. mengendalikan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional di lingkup Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan tahapan:
1. merancang prosedur tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. memantau pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Satpol PP sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menetapkan jadwal pengarahan berkala;
 2. menerangkan jabaran tugas atau program di lingkup unit kerja;
 3. mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas bawahan; dan
 4. menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.

g. mengevaluasi ...

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Satpol PP dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencanayang akan datang, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Satpol PP;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pengendalian tugas lingkup Sekretariat, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS, dan Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satpol PP, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan tugas bawahan;
 - 2. menelaah laporan kemajuan pelaksanaan tugas;
 - 3. memberikan catatan/perbaikan; dan
 - 4. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyelenggarakan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. menetapkan jadwal kegiatan penyusunan laporan tahunan;
 - 2. merancang konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 - 3. memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan lingkup Satpol PP;
 - 4. mengadakan rapat koordinasi pembahasan draft perencanaan dan pelaporan dengan pejabat terkait; dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, baik pelayanan teknis maupun administratif dan koordinasi tugas Bidang-Bidang secara terpadu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Satpol PP;
- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 3. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 4. mengkonsultasikan draf rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan; dan
 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional lingkup Sekretariat dengan menjabarkan rencana operasional Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menelaah program kerja Satpol PP;
 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 3. mengkonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 3. membagi tugas kepada pejabat terkait; dan
 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Satpol PP, dengan tahapan:
 - 1. merumuskan prosedur tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 - 2. melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 3. mengevaluasi tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan lingkup sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah Satpol PP dari Pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah Satpol PP yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 - 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi ...

- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkup Sekretariat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Sekretariat;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat, dengan tahapan:
1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 2. mereviu konsep laporan;
 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 4. memfinalisasi laporan.
- i. menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 3. memberikan ...

3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan laporan kepada pejabat terkait lingkup Satpol PP;
 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Paragraf 1
Tugas

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
 1. pembuatan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan Satpol PP, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
 3. pelaksanaan ...

3. pelaksanaan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Satpol PP serta kantor;
 4. pelaksanaan tugas kehumasan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Satpol PP;
 5. pembuatan laporan kepegawaian, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), bahan pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) setiap pegawai dan usulan kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, bahan pemberhentian, memproses pelanggaran disiplin pegawai, serta data pegawai yang akan mengikuti diklat ke Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan diklat;
 6. penyusunan rencana penganggaran dan pengelolaan perjalanan Satpol PP;
 7. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan;
 8. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Satpol PP;
 9. pelaksanaan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan kantor;
 10. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan Satpol PP;
 11. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, BPJS, dan Tapera;
 12. penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai; dan
 13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Satpol PP;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan ...

- i. penyiapan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat lingkup Satpol PP;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 4. mengkonsultasikan draft rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 - 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:

- 1. menelaah ...

1. menelaah rencana operasional Sekretariat;
 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Satuan, dengan tahapan:
1. menyusun prosedur tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 2. menentukan ...

2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. mengkonsultasikan ...

3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian ...

Bagian Kelima
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan
Keuangan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 14

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris, yang mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
 1. pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 2. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dan pengumpulan rencana kerja pejabat lingkup Satpol PP;
 3. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis;
 4. penyampaian naskah dinas rencana pembangunan berkaitan dengan setiap tugas dan fungsi Kepala Satpol PP ke Bappeda Litbang;
 5. pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 6. pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;
 7. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan;
 8. pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 9. pengumpulan dan mengolah data laporan hasil kegiatan Satpol PP;
 10. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data dan informasi;
 11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Satpol PP;
 12. pelaksanaan penyusunan laporan-laporan terkait urusan Pemerintahan Daerah dan penyampaian ke Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan Bappeda Litbang;
 13. penyusunan ...

13. penyusunan rencana kegiatan perjalanan Satpol PP;
14. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKAdan DPA;
15. pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
16. pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
18. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Satpol PP;
19. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
20. pengajuan SPP untuk belanja operasi/belanja modal/belanja tidak terduga/belanja transfer;
21. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
22. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
23. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat;
24. pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
25. pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
26. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kerja Satpol PP;
27. pengevaluasian hasil program kerja;
28. pembuatan laporan hasil kegiatan;
29. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
30. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;dan
31. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Satpol PP;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan ...

- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. menjelaskan rencana kegiatan kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis dengan Pejabat lingkup Satpol PP;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 - 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan ...

- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah rencana operasional Sekretariat;
 - 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 - 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 - 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 - 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Satpol PP, dengan tahapan:
 - 1. menyusun prosedur tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 - 2. melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan; dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan.
- e. mengawasi ...

- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
 - 1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 - 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 - 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 - 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 - 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 - 4. menghimpun ...

5. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 6. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan;
 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari ...

1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan
PPNS
Paragraf 1
Tugas

Pasal 17

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dengan menjabarkan rencana operasional Satuan berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian ...

- c. pengoordinasian tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik;
- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS memiliki rincian tugas:

- a. menyusun rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS;
 - 4. mengonsultasikan draft penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pimpinan; dan
 - 5. memfinalisasi rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dengan menjabarkan rencana operasional Satpol PP berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Satpol PP;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ...

3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 3. membagi tugas kepada pejabat terkait; dan
 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- d. melaksanakan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik, dengan tahapan:
1. merumuskan prosedur tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dan Investigasi Kebakaran;
 2. melaksanakan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS; dan
 3. mengevaluasi ...

3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS.
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/ naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan ...

3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 2. mereviu konsep laporan;
 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 4. memfinalisasi laporan.
- i. penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan PPNS;
 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada pimpinan; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan
Perundang-Undangan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 20

Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
1. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis penyuluhan dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 2. sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 3. penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 4. pelaporan Kegiatan Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan dan Perundang-undangan kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan PPNS dengan menyusun laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. melakukan ...

- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisan ...

- g. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:

1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menelaah rencana operasional Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab.
- c. mendistribusikan ...

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 - 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang, dengan tahapan:
 - 1. menyusun prosedur kegiatan urusan Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. mengelola pelaksanaan kegiatan urusan Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis ...

- g. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah Satpol PP dari pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah Satpol PP yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah Satpol PP yang telah sesuai/diperbaiki.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- j. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan pelaporan kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan;
 4. mengonsultasikan draft pelaporan kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan
Pembinaan PPNS
Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan;
 1. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis pengawasan peraturan perundangan - undangan dan pembinaan PPNS;
 2. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 3. pengembangan ...

3. pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
 4. pelaporan Kegiatan Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan dan PPNS dengan menyusun laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
 5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- e. pengawasan ...

- f. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- j. penyiapan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menelaah rencana operasional Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS;
 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan ...

- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 - 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 - 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 - 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang, dengan tahapan:
 - 1. menyusun prosedur kegiatan urusan Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS;
 - 2. mengelola pelaksanaan kegiatan urusan Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS; dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS.
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis ...

- g. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah Satpol PP sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah dinas yang telah sesuai/diperbaiki.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- j. menyiapkan ...

- j. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satpol PP;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan pelaporan kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Paragraf 1
Tugas

Pasal 26

Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan dan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menjabarkan rencana operasional Satuan berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengoordinasian tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik;
- e. penyelia ...

- e. penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyusunan dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki rincian tugas:

- a. menyusun ...

- b. menyusun dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan penyusunan konsep dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. mengonsultasikan draft dokumen perencanaan strategis kepada pimpinan; dan
 - 5. memfinalisasi dokumen perencanaan strategis.
- c. melaksanakan penyusunan rencana operasional di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menjabarkan rencana operasional Satuan berdasarkan standar operasional prosedur dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah program kerja Satuan;
 - 2. merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3. mengonsultasikan ke Bagian Organisasi;
 - 4. merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 5. merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja; dan
 - 6. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- d. mengoordinasikan ...

- d. mengoordinasikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien, dengan tahapan:
 - 1. menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2. mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan bawahan;
 - 3. membagi tugas kepada pejabat terkait; dan
 - 4. menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
- e. melaksanakan tugas lingkup lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersinkronisasi dengan baik, dengan tahapan:
 - 1. merumuskan prosedur tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 - 2. melaksanakan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan; dan
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- f. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
 - 1. menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2. menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3. mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 - 4. membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- g. menganalisis ...

- g. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari Pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. membubuhkan paraf dan/atau menandatangani dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan pada lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi dan Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
 2. mereviu konsep laporan;
 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan; dan
 4. memfinalisasi laporan.
- j. menyusun ...

- j. menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan-laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan perencanaan laporan kepada pejabat terkait di lingkup Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan laporan kepada pimpinan; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesepuluh
Seksi Pengendalian dan Operasi
Paragraf 1
Tugas

Pasal 29

Seksi Pengendalian dan Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:

- a. mengawasi ...

- a. mengawasi dan mengendalikan;
 1. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis Seksi Pengendalian dan Operasi;
 2. pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan;
 3. penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 4. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 5. penyusunan Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 6. penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 7. pelaporan Kegiatan Seksi Pengendalian dan Operasi kepada Kepala Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menyusun laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait Seksi Pengendalian dan Operasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan ...

- a. penyiapan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Pengendalian dan Operasi berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Seksi;
- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisaan dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi, memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - 4. mengonsultasikan draft penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 - 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Pengendalian dan Operasi, berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
 - 1. menelaah rencana operasional Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - 2. mengidentifikasi ...

2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang, dengan tahapan:
1. menyusun prosedur tugas Seksi Pengendalian dan Operasi;
 2. melaksanakan tugas Seksi Pengendalian dan Operasi; dan
 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Operasi.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 4. membuat ...

4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi landasan pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. mengonsultasikan konsep laporan kepada atasan; dan
 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
1. mengoordinasikan ...

1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi, dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan pelaporan kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Pengendalian dan Operasi;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesebelas
Seksi Kerjasama dan Kemitraan
Paragraf 1
Tugas

Pasal 32

Seksi Kerjasama dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan mengendalikan:
 1. penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kota;
 3. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 4. peningkatan ...

4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 5. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 6. pelaporan Kegiatan Seksi Kerjasama dan Kemitraan kepada Kepala Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan menyusun laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi terkait Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pengelolaan tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- e. pengawasan ...

- e. pengawasan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- i. penyiapan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3

Rincian Tugas dan Tahapan Pelaksanaan Tugas

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan memiliki rincian tugas:

- a. menyiapkan data bahan penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 - 3. memberikan ...

3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 4. mengonsultasikan draft penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknis kepada atasan langsung; dan
 5. memfinalisasi dokumen rencana strategis dan kebijakan teknis.
- b. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan rencana operasional Bidang dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menelaah rencana operasional Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. mengidentifikasi kriteria hasil kerja untuk setiap kegiatan dalam rencana operasional;
 3. menyusun detail rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan;
 4. menetapkan rencana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari atasan; dan
 5. membagi tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan tahapan:
1. menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan;
 2. mendelegasikan tugas kepada bawahan;
 3. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
 4. menentukan target waktu penyelesaian.
- d. mengelola tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkup Bidang, dengan tahapan:
1. menyusun prosedur tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. melaksanakan ...

2. melaksanakan tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan; dan
 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- e. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan, dengan tahapan:
1. menelaah hasil kerja yang dilakukan bawahan;
 2. menentukan standar kualitas/kuantitas hasil kerja;
 3. mengidentifikasi kesalahan hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan; dan
 4. membuat koreksi pada hasil kerja berupa catatan tertulis.
- f. menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon, dengan tahapan:
1. memeriksa dokumen/naskah dinas dari pejabat terkait;
 2. mengembalikan dokumen/naskah dinas yang masih terdapat kesalahan untuk diperbaiki; dan
 3. memberikan paraf pada dokumen/naskah yang telah sesuai/diperbaiki.
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang, dengan tahapan:
1. mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 2. mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan program kerja;
 3. menjelaskan perbandingan antara kondisi pelaksanaan kegiatan dengan program yang diharapkan;
 4. menghimpun masukan atau kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 5. memberikan arahan sesuai hasil evaluasi kegiatan.
- h. melaporkan ...

- h. melaporkan pelaksanaan kinerja tugas Seksi Kerjasama dan Kemitraan, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan tahapan:
 - 1. menganalisis capaian kinerja bawahan;
 - 2. membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas
 - 3. mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;dan
 - 4. memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- i. menyiapkan data bahan penyusunan laporan tahunan di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban, dengan tahapan:
 - 1. mengoordinasikan dengan pejabat terkait di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan dan membagi tugas pengumpulan bahan;
 - 2. mengoordinasikan konsep rencana penyusunan pelaporan dengan pejabat terkait di lingkup Satuan;
 - 3. memberikan fasilitasi dan verifikasi penyusunan pelaporan kepada pejabat terkait di lingkup Seksi Kerjasama dan Kemitraan;
 - 4. mengkonsultasikan draft penyusunan pelaporan kepada atasan langsung;dan
 - 5. memfinalisasi dokumen pelaporan.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi, dengan tahapan:
 - 1. mempelajari tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan referensi dan regulasi terkait;
 - 2. meminta arahan dan petunjuk pimpinan terhadap pelaksanaan tugas lain;
 - 3. menjalankan tugas lain berdasarkan arahan dan petunjuk pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;dan
 - 4. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Pada lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai jenjangnya berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan guna mencapai target kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI UPTD

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Banten.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII TATAKERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Setiap Pejabat lingkup Satpol PP bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (2) Setiap Pejabat lingkup Satpol PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pejabat struktural dan fungsional lingkup Satpol PP dibantu oleh pelaksana untuk penyelenggaraan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP.

(4) Dalam ...

- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Satpol PP wajib menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan Asisten Sekretaris Daerah terkait.
- (6) Setiap pegawai lingkup Satpol PP melakukan hubungan kerjasama secara hirarki dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan berdasarkan aturan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satpol PP serta dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala unit organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Apabila Kepala Satpol PP berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk bertindak atas nama Kepala Satpol PP.
- (2) Apabila Pejabat lingkup Satpol PP berhalangan dalam pelaksanaan tugas, maka dapat menunjuk 1 (satu) orang Pejabat satu tingkat dibawahnya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal mewakili, setiap Pejabat dibawah Kepala Satpol PP sebelum melaksanakan tugas yang diwakilkan, harus dapat mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 21 Februari 2022
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2022 NOMOR 7

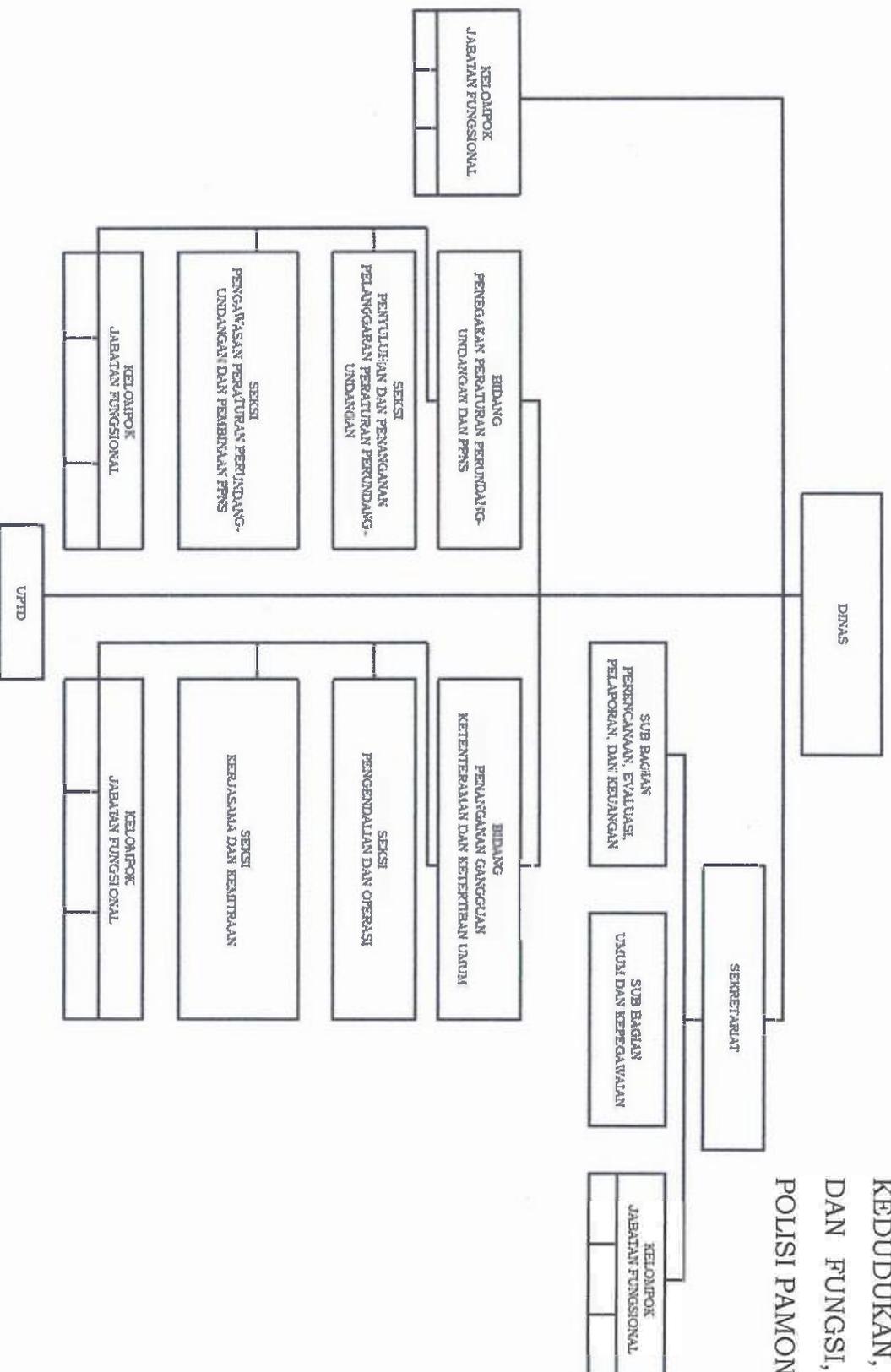
LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALI KOTA CILEGON

ttd

HELLDY AGUSTIAN